



Legislatif Minta Sanksi Tegas

■ DLH: Denda Bagi Pelanggar Pemilahan Sampah Sulit Diterapkan

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta lebih tegas kepada warga terkait pemilahan sampah. Hal ini penting untuk memupus tumpukan sampah yang menjadi problem serius di kota pelajar ini. Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar Jalumurti, menegaskan, gerakan zero sampah anorganik yang diterapkan sejak 1 Januari 2023 lalu sejauh ini sudah membuahkan hasil. Hanya saja, ia menilai, setelah berlangsung selama lebih kurang 6 bulan, sudah saatnya Pemkot Yogya mulai memikirkan regulasi yang lebih mengikat bagi warga masyarakat.

"Dulu dari Pemkot bilang butuh 3-4 bulan untuk membangun budaya itu. Sekarang seharusnya setelah satu semester kesadaran terbangun," katanya di sela diskusi "Obrolan Tugu Jogja", Selasa (27/6) sore.

Politikus Partai Keadilan

PROBLEM SERIUS

- Legislatif minta Pemkot Yogyakarta tegas kepada warga terkait pemilahan sampah.
- Dewan minta Pemkot terapkan sanksi bukan edukasi lagi bagi warga.
- DLH Kota Yogyakarta menyebut sanksi denda sulit diterapkan karena memberatkan warga.

Sejahtera (PKS) itu, berujar, sebuah proses untuk membangun budaya kesadaran terkait pemilahan sampah jelas bukan hal yang mudah. Terlebih, selama ini, warga masyarakat di Kota Yogya sudah terlanjur "dimanja" dengan biaya murah soal retribusi pembuangan sampah, sehingga kebiasaan memilah dari level rumah tangga pun terasa berat.

"Toh, tinggal bayar saja murah. Bayar Rp50 ribu

per bulan sampah sudah diambil sama penggerobak. Itu berbeda dengan di luar negeri yang sudah sejak lama menerapkan pemilahan di rumah tangga," katanya.

Karena itu, Bambang menandakan, eksekutif harus menerapkan sanksi tegas bagi penduduk yang masih melanggar kebijakan yang sudah dipayungi dengan Peraturan Daerah (Perda) tersebut, ia mencontohkan, selama ini, petugas Linmas yang dikerahkan untuk menjaga depo atau tempat pembuangan sementara (TPS) pun masih sebatas memberi edukasi semata.

"Selama ini masih edukasi, belum ada sanksi. Itu harus diperkuat dengan regulasi agar petugas berani tegas," urainya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya, Sugeng Darmanto, mengatakan, untuk merealisasikan sebuah kota yang indah, harus dimulai dari memba-

ngun karakter masyarakat. Yakni, dengan mengubah budaya terkait pengelolaan limbah dan memperkuatnya, sehingga konsisten diterapkan secara kompleks dalam jangka waktu yang panjang.

Dirinya pun mencontohkan, di Surabaya, hukuman dapat diterapkan, di mana para pelanggar peraturan soal sampah dapat dikenai denda berat hingga jutaan rupiah. Akan tetapi, dalam kurun 6 bulan diterapkan gerakan zero sampah anorganik, ia merasa hukuman berupa denda uang tunai tersebut, masih cenderung berat untuk diberlakukan bagi warga Kota Yogya.

"Kemarin Satpol PP sempat menindak pelanggar itu. Namun, setelah sidang tipiring, vonisnya hanya Rp200 ribu. Bahkan, ada yang Rp50 ribu, karena pelanggar orang tidak mampu dan tidak bisa bayar. Lalu, yang bayar malah Satpol PP kan repot," ujarnya. (aka/ord)



TRIBUN JOGJA/AJUKA RAMADHAN
DISKUSI - Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar Jalumurti (kanan) bersama Kepala DLH Kota Yogya, Sugeng Darmanto (tengah) saat berdiskusi dalam "Obrolan Tugu Jogja", Selasa (27/6).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005